



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR: 065 / 732 / 2022
TENTANG
PENETAPAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2023-2028

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi serta untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tepat di Kabupaten Blora, perlu disusun Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Blora, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

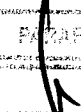


7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang paduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintahan Kabupaten Blora Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun Terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan berdasarkan :
- perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - perubahan Arsitektur SPBE, dan
 - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30-12-2022
BUPATI BLORA,

| JABATAN | PARAF | TGL |
|---------------|---|----------|
| Kepala Daerah |  | |
| Asisten |  | 5-4-23 |
| Ketua |  | 30-03-23 |


ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora
selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 065/ 732 /2022
TANGGAL 30 -12 -2022

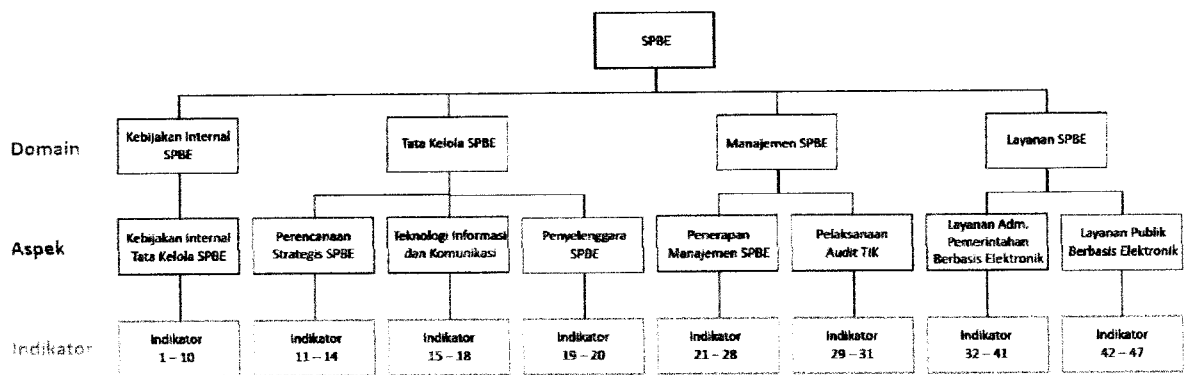
PETA RENCANA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2023-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *e-Government* merupakan keniscayaan dalam birokrasi pemerintahan dan layanan publik untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Dalam penerapannya diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif agar tujuan yang hendak dicapai dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) saat ini pada Pemerintah Kabupaten Blora belum berjalan secara optimal baik untuk kebutuhan internal pemerintah maupun untuk masyarakat walaupun telah ditunjang oleh infrastruktur TI dan berbagai aplikasi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Blora masih mengalami permasalahan pada pemanfaatan sumber daya yang belum didukung dengan aturan dan prinsip-prinsip tata kelola SPBE yang baik, sehingga perencanaan investasi TI yang dilakukan tidak didasari dari analisis kebutuhan bisnis Pemerintah Kabupaten Blora, serta belum adanya kesadaran mengenai pentingnya perencanaan investasi TI yang dilakukan selaras dan terintegrasi dengan visi, misi, tujuan dan strategi Pemerintah Kabupaten Blora.

Dalam tataran nasional, adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan dorongan dan arahan baru terkait arah pengelolaan dan pengembangan TIK Nasional. Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah harus merujuk peraturan tersebut dalam menyelenggarakan TIK-nya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Instrumen Evaluasi SPBE (PermenPANRB Nomor 59/2020)

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berdasarkan peraturan tersebut dipersyaratkan untuk dapat dipenuhinya semua Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat Aspek Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup Arsitektur serta Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedua indikator tersebut merupakan hal yang wajib ada dan menjadi salah satu dasar implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan indeks akhir **2,80**. Indeks ini menunjukkan hasil dengan predikat **“Baik”**. Untuk Aspek Perencanaan Strategis, indeks yang diperoleh adalah **2,00**. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks tersebut adalah dengan menyusun Peta Rencana SPBE yang bersifat komprehensif.

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Blora yang menguraikan tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Blora untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pekerjaan yang dilakukan pada penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kondisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Saat Ini,
2. Penyusunan Kondisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diharapkan,
3. Analisis Kesenjangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
4. Inisiatif Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
5. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II
METODOLOGI

Metodologi penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Blora mengacu pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Metodologi yang akan digunakan dalam Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kondisi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
2. Penentuan kondisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diharapkan selama 5 (lima) tahun ke depan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Analisis kesenjangan terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan.
4. Penyusunan inisiatif strategis, prioritas dan peta rencana Pemerintah Kabupaten Blora.

Rencana kerja, komposisi tim serta jadwal penugasan tenaga ahli dalam penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Blora seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Blora

| NO. | KEGIATAN | MINGGU KE- | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Administrasi Dokumen | | | | | | | | |
| 2. | Pembentukan tim, perangkat, sosialisasi awal | | | | | | | | |
| 3. | Penyusunan Laporan Pendahuluan | | | | | | | | |
| 4. | Kajian dokumen, survey dan observasi | | | | | | | | |
| 5. | Analisis hasil kajian dokumen, survey, dan observasi | | | | | | | | |
| 6. | <i>Focus Group Discussion</i> | | | | | | | | |
| 7. | Penyusunan dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | |
| 8. | Penyusunan Rancangan Laporan Akhir | | | | | | | | |
| 9. | Penyempurnaan Laporan Akhir | | | | | | | | |
| 10. | Presentasi dan penyampaian Laporan Akhir | | | | | | | | |

BAB III

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Setelah kondisi saat ini dipetakan serta kondisi yang diharapkan telah ditentukan, kemudian perlu dilakukan analisis kesenjangan terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Blora seperti berikut:

Arsitektur Proses Bisnis

Tabel 4. Hasil Analisis Kesenjangan

| No | Komponen | Kondisi Saat Ini | Kondisi Target | Perbedaan Kondisi Saat Ini dan Target |
|----|------------------------------------|---|---|--|
| 1. | Pemetaan Proses Bisnis | Pemetaan proses bisnis yang terintegrasi telah tertuang dalam Peraturan Bupati Blora | Perlu pendetailan dan penyesuaian proses bisnis serta integrasi sampai dengan level lintas fungsi untuk diperbarui dalam bentuk Peraturan Bupati Blora | <i>Partially</i> Melakukan penyesuaian proses bisnis menyesuaikan dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat terkait status maupun posisi kementerian lembaga lain yang terkait dengan proses bisnis Kabupaten Blora |
| 2. | Kebijakan Integrasi Proses Bisnis | Sudah terdapat kebijakan terkait Pemetaan proses bisnis yang terintegrasi telah tertuang dalam Peraturan Bupati Blora | Perlu update kebijakan terkait integrasi proses bisnis di seluruh perangkat daerah Kabupaten Blora sesuai dengan perubahan arahan kebijakan dari pemerintah pusat | <i>Partially</i> Penyesuaian Kebijakan Proses Bisnis Terintegrasi, memperbaharui kebijakan peta proses bisnis terintegrasi yang sudah ada saat ini. |
| 3. | Meta Data Arsitektur Proses Bisnis | Belum terdapat Meta Data Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Blora | Memiliki Meta Data Arsitektur Proses Bisnis sesuai dengan Kebijakan Proses Bisnis saat ini | <i>None</i> Menyusun Meta Data Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Blora sesuai dengan Peta Proses Bisnis yang berjalan |

Arsitektur Data dan Informasi

| NO | KOMPONEN | KONDISI SAAT INI | KONDISI TARGET | PENCAPAIAN | REKOMENDASI PERAKARSAJAYA |
|----|----------------------------|---|---|------------------|---|
| 1. | Penyusunan Arsitektur Data | Pemetaan proses bisnis yang terintegrasi telah tertuang dalam Peraturan Bupati Blora | Perlu mengidentifikasi detail arsitektur data berdasarkan Peta proses bisnis terintegrasi target Kabupaten Blora terbaru yang sudah ditetapkan | <i>Partially</i> | Update penyusunan arsitektur data Kabupaten Blora sesuai Peta proses bisnis terintegrasi target Kabupaten Blora. |
| 2. | Satu Data Indonesia | Dalam tahap mengidentifikasi dan penyusunan data Kabupaten Blora sesuai dengan arahan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia | Terkait kebijakan satu data Indonesia, Kabupaten Blora perlu mengidentifikasi data apa saja yang menjadi otorisasi Kabupaten Blora sebagai wali data dan produsen data, memenuhi persyaratan standar data, meta data yang dibutuhkan, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan atau data induk | <i>Partially</i> | Melakukan penyusunan detail Arsitektur Data untuk mengidentifikasi data apa saja yang menjadi otorisasi Kabupaten Blora sebagai wali data dan produsen data, memenuhi persyaratan standar data, meta data yang dibutuhkan, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/ atau data induk |
| 3. | Meta Data Arsitektur Data | Belum terdapat Meta Data Arsitektur Data | Memiliki Meta Data Arsitektur Data sesuai dengan Peta Proses Bisnis yang berjalan | <i>None</i> | Menyusun Meta Data Arsitektur Data Kabupaten Blora sesuai dengan Peta Proses Bisnis yang berjalan |

Arsitektur Layanan

| NO. | KOMPONEN | MOMEN DAMPAK | KONDISI TERKINI | PENGALAMAN | REKOMENDASI DAN STRATEGI LAYANAN |
|-----|---------------------------------|---|--|-------------------------|--|
| 1. | Layanan Administrasi Pemerintah | <p>Untuk Layanan Administrasi di Kabupaten Blora saat ini didukung oleh aplikasi umum baik yang dikembangkan secara internal maupun yang sudah disediakan oleh Instansi Pusat lainnya. Saat ini belum seluruh aplikasi mendukung layanan administrasi pemerintahan sudah terintegrasi. Pemerintah saat ini sedang melakukan penyusunan layanan administrasi pemerintahan dalam bentuk portal layanan administrasi pemerintahan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018</p> | <p>Untuk kebutuhan integrasi layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Blora, kedepannya dapat diarahkan untuk memanfaatkan portal layanan administrasi pemerintahan berbasis pakai nasional yang saat ini masih dalam proses pengembangan sesuai arahan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Blora yang terintegrasi</p> | <p><i>Partially</i></p> | <p>Melakukan review terhadap portal layanan administrasi pemerintahan berbagai pakai nasional apabila sudah tersedia untuk dapat digunakan di Kabupaten Blora. Alternatif lainnya adalah dengan melakukan pengembangan e-Office Kabupaten Blora yang kedepannya difungsikan sebagai portal layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Blora yang komprehensif dan terintegrasi.</p> |
| | | <p>Untuk mendukung Layanan Administrasi (Internal) belum terlihat adanya aplikasi yang berfungsi sebagai portal layanan administrasi pemerintahan dan penyedia layanan umum dalam lingkup Kabupaten Blora yang terintegrasi dan komprehensif, seperti aplikasi e-office dengan dukungan manajemen dokumen, pengelolaan naskah dinas, <i>knowledge management</i>, forum, komunikasi dan kolaborasi dll.</p> | <p>Layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Blora yang didukung e-Office perlu dikembangkan dan dilengkapi untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan di lingkungan Kabupaten Blora secara keseluruhan, dan kedepannya dapat diintegrasikan dengan portal layanan administrasi pemerintahan berbagai pakai nasional.</p> | <p><i>Partially</i></p> | <p>Pengembangan portal intranet Kabupaten Blora / e-Office berbasis <i>web based</i> yang dapat terintegrasi dengan layanan administrasi pemerintahan lainnya, misalnya dengan pengembangan integrasi berbasis <i>microservices</i> atau menggunakan sistem penghubung</p> |

| No. | Kategori | Kelebihan | Kelemahan | Tingkat | Saran |
|-----|----------------|---|---|--|---|
| | | <p>Layanan administrasi pemerintahan umumnya belum dapat diakses pada platform yang lebih mudah dan <i>user friendly</i> khususnya melalui perangkat <i>mobile</i> di lingkungan Kabupaten Blora</p> | <p>Layanan administrasi pemerintahan kedepan dapat diakses pada platform yang lebih mudah dan <i>user friendly</i> khususnya melalui perangkat <i>mobile</i> oleh pengguna di lingkungan Kabupaten Blora</p> | <p><i>Partially</i></p> | <p>Pengembangan portal intranet Kabupaten Blora/ <i>e-Office</i> berbasis <i>mobile</i></p> |
| 2. | Layanan Publik | <p>Untuk mendukung Layanan Publik, namun secara umum di lingkup Kabupaten Blora, operasional dan sistemnya masih terpisah-pisah dalam web site perangkat daerah, masih cukup banyak layanan publik yang bersifat layanan satu arah (informatif) saja</p> <p>Layanan Publik di Kabupaten Blora saat ini belum banyak yang tersedia dalam bentuk layanan dengan dukungan aplikasi <i>mobile</i> (Android)</p> | <p>Layanan Publik Kabupaten Blora kedepan, yang dapat diakses pada secara satu pintu pada terintegrasi dengan seluruh layanan pendukung untuk keseluruhan lingkup perangkat daerah di Kabupaten Blora</p> <p>Perlu terdapat layanan publik Kabupaten Blora yang terintegrasi dan berbasis <i>mobile</i></p> | <p><i>Partially</i></p> <p><i>None</i></p> | <p>Pengembangan portal layanan publik Kabupaten Blora yang terintegrasi dan mengakomodasi seluruh kebutuhan layanan publik di lingkungan Kabupaten Blora</p> <p>Pengembangan portal layanan publik Kabupaten Blora yang terintegrasi dan mengakomodasi seluruh kebutuhan layanan publik di lingkungan Kabupaten Blora yang dapat diakses via aplikasi <i>mobile</i></p> |

Arsitektur Aplikasi

| NO | KOMPONEN | KONDISI SAAT INI | KONDISI TARGET | PENGALIHAN | REKOMENDASI TINDAK LANJUT |
|----|---------------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | Aplikasi Umum Layanan Publik | Aplikasi pendukung layanan Publik sudah baik namun belum terintegrasi. | Aplikasi-aplikasi layanan Publik dalam Portal Aplikasi Layanan Publik | <i>Largely</i> | Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan Publik |
| 2 | Aplikasi Umum Administrasi Pemerintah | Aplikasi pendukung layanan Perencanaan dan Program sudah baik namun belum terintegrasi. Sudah menggunakan aplikasi umum dari instansi pusat. Aplikasi pendukung layanan Keuangan sudah baik namun belum terintegrasi. Aplikasi pendukung layanan Sumber Daya Manusia sudah baik namun belum terintegrasi. | Aplikasi-aplikasi pendukung layanan Perencanaan dan Program Portal Aplikasi Layanan Perencanaan dan Program Aplikasi-aplikasi pendukung layanan Keuangan terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Keuangan Aplikasi-aplikasi pendukung layanan Sumber Daya Manusia terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Sumber Daya Manusia | <i>Largely</i> <i>Largely</i> <i>Largely</i> <i>Largely</i> | Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan Perencanaan dan Program ke dalam Portal Layanan Perencanaan dan Program Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan Keuangan ke dalam Portal Layanan Keuangan Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan Sumber Daya Manusia ke dalam Portal Layanan Sumber Daya Manusia Aplikasi layanan kearsipan saat ini sudah baik, namun akan lebih baik lagi dengan adanya diintegrasikan dengan portal layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Blora |

| KOMPONEN | KONDISI SAAT INI | | | REKOMENDASI |
|---|--|--|----------------|--|
| 3 Aplikasi Khusus | Aplikasi pendukung layanan khusus sudah baik namun belum terintegrasi. | Aplikasi-aplikasi pendukung layanan internal Pemantapan Ketahanan Pangan terintegrasi dalam Portal Aplikasi Layanan Internal Pemantapan Ketahanan Pangan | <i>Largely</i> | Perlu dilakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi pendukung layanan internal Pemantapan Ketahanan Pangan ke dalam Portal Layanan Internal Pemantapan Ketahanan Pangan |
| 4 Portal Satu Data Lingkup Kabupaten Blora | Belum ada aplikasi untuk mendukung pengelolaan data statistik dan satu data lingkup Kabupaten Blora untuk mendukung Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. | Terdapat aplikasi pengelolaan data statistik dan satu data lingkup Kabupaten Blora untuk mendukung Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Blora yang terintegrasi dengan aplikasi provider/ produsen data statistik terkait. | <i>None</i> | Pengembangan Portal Satu Data Lingkup Kabupaten Blora yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia (data.go.id). |
| 5 Website Resmi Kabupaten Blora | Website Resmi Kabupaten Blora sudah baik. | Website Resmi Kabupaten Blora sudah baik dan sudah optimal dengan selalu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. | <i>Fully</i> | Selalu dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada Website Resmi Kabupaten Blora. |
| 6 Pengembangan Data Warehouse, Data Lake, Business Intelligence, dan Big Data Analyticy | Belum terlihat adanya aplikasi untuk pengelolaan data yang bersifat komprehensif dan terintegrasi se Kabupaten Blora khususnya untuk kepentingan analitik, dukungan kebutuhan informasi untuk eksekutif dan pengambilan keputusan. | Terdapat sistem untuk pengelolaan data yang bersifat komprehensif dan terintegrasi se-Kabupaten Blora khususnya untuk kepentingan analitik, dukungan kebutuhan informasi untuk eksekutif dan dukungan pengambilan keputusan. | <i>None</i> | Melakukan perancangan dan pengembangan Data Warehouse dan Data Lake Kabupaten Blora. |

| No | Kategori | Kondisi | Terdapat | Tidak | Kategori |
|----|---|---|--|-----------|---|
| | Belum terdapat informasi yang analisis data secara komprehensif dan terintegrasi pada Kabupaten Blora | Belum ada pengembangan ke arah big data analytic Kabupaten Blora | Terdapat sistem informasi yang dapat melakukan analisis data secara komprehensif dan terintegrasi, misalnya sistem informasi dengan kapabilitas Business Intelligence pada Kabupaten Blora | None | Mengembangkan sistem business intelligence Kabupaten Blora |
| | Belum ada pengembangan ke arah big data analytic Kabupaten Blora | Sudah dikembangkan sistem informasi eksekutif (<i>dashboard</i>) Kabupaten Blora yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah | Terdapat big data analytic Kabupaten Blora yang dapat memenuhi kebutuhan analisis data yang semakin kompleks di masa depan | None | Melakukan pengembangan <i>big data analytic</i> Kabupaten Blora |
| | Sudah dikembangkan sistem informasi eksekutif (<i>dashboard</i>) Kabupaten Blora yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah | Belum terdapat sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Blora | Terdapat sistem informasi eksekutif Kabupaten Blora yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah | Partially | Pengembangan sistem informasi eksekutif terintegrasi (<i>dashboard</i>) Kabupaten Blora |
| | Belum terdapat sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Blora | Terdapat sistem pendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Blora yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. | Terdapat sistem pendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Blora yang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. | Partially | Pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan di Kabupaten Blora. |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| 7 | Integrasi Aplikasi | <p>Belum terlihat adanya media integrasi aplikasi yang dapat digunakan secara menyeluruh untuk integrasi aplikasi di lingkup Kabupaten Blora, misalnya menggunakan GSB (<i>Government Service Bus</i>)</p> | <p>Perlu ada media integrasi aplikasi berupa sistem (<i>Government Service Bus</i>) atau yang kompatibel yang sifatnya menyeluruh di lingkup Kabupaten Blora sebagai standar dan media integrasi aplikasi</p> | None | <p>Perlu penerapan sistem penghubung atau GSB (<i>Government Service Bus</i>) dengan menggunakan sistem penghubung nasional yang bersifat berbagi pakai atau mengembangkan sendiri dengan menggunakan platform berbasis Open Source</p> |
| | <p>Aplikasi eksisting umumnya belum siap untuk dapat diintegrasikan khususnya dengan menggunakan <i>Application Programming Interface (API)</i> atau <i>web services</i></p> <p>Belum terdapat layanan <i>authorization</i> dan <i>authentication management</i> yang diperlukan untuk manajemen akses user terkait sistem aplikasi yang terintegrasi</p> | <p>Seluruh aplikasi di lingkup Kabupaten Blora idealnya dapat diintegrasikan dengan sistem menggunakan penghubung atau menggunakan API atau <i>web services</i></p> <p>Terdapat mekanisme <i>authorization</i> dan <i>authentication management</i> yang terimplementasikan untuk seluruh aplikasi yang terintegrasi</p> | Partially | <p>Pengembangan aplikasi kedepannya dilakukan dengan menggunakan media integrasi sistem penghubung atau menggunakan API/ <i>web services</i> atau bahkan menggunakan <i>microservices</i></p> <p>Mengembangkan <i>authorization</i> dan <i>authentication management</i> dan diimplementasikan pada seluruh sistem informasi di lingkup Kabupaten Blora</p> | |
| 8 | Meta Data Arsitektur Aplikasi | Belum terdapat Meta Data Arsitektur Aplikasi Kabupaten Blora | Memiliki Meta Data Arsitektur Aplikasi sesuai dengan Kebijakan layanan dan aplikasi saat ini | None | Menyusun Meta Data Arsitektur Aplikasi Kabupaten Blora |

Arsitektur Infrastruktur

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------|---|
| 1 | Meta Data Arsitektur Infrastruktur | Belum terdapat Meta Data Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Blora | Memiliki Meta Data Arsitektur | None | Menyusun Meta Data Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Blora |
| 2 | Pusat Data Nasional | Pusat data Kabupaten Blora belum terintegrasi dengan Pusat Data Nasional | Resource Pusat Data Nasional sebagai fungsi co-location dan data storage backup untuk keseluruhan aplikasi Kabupaten Blora | None | Optimalisasi pemanfaatan resource Pusat Data Nasional sebagai fungsi co- location dan data storage |
| 3 | Pusat Komputasi | Sebagian fasilitas pendukung memiliki kelengkapan bidang arsitektur, mekanikal, elektrik, dan perkabelan | Acuan fasilitas pendukung memenuhi persyaratan SNI 8799 series | <i>Partially</i> | Pengelolaan dan pelengkapan fasilitas, serta penyusunan dokumen pengelolaan Pusat Data agar mendukung SNI 8799 series dalam rangka sertifikasi SNI Pusat Data |
| | | Pengelompokan <i>virtual machine</i> saat ini masih belum disesuaikan dengan arsitektur aplikasi | Arsitektur Virtual Machine disesuaikan dengan arsitektur aplikasi | <i>Partially</i> | Inventarisasi dan pengelolaan ulang Virtual Machine (VM) sesuai arsitektur aplikasi |
| | | <i>Usage storage backup</i> masih belum memadai | Ketersediaan storage yang memadai untuk aktivitas backup | <i>Partially</i> | Inventarisasi dan strategi pengelolaan backup sistem dan aplikasi |
| | | Kondisi Storage Repository masih belum mencukupi | Ketersediaan storage yang memadai untuk aktivitas backup | <i>Partially</i> | Peningkatan kapasitas storage Pusat Komputasi Kabupaten Blora |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|------------------|---|
| 4 | Pusat Kendali | Sudah terdapat monitoring jaringan dan layanan aplikasi | Pemantauan pada level jaringan dan aplikasi terkait penggunaan sumber daya dan kinerja | <i>None</i> | Kelengkapan pemantauan aplikasi dan jaringan untuk mendukung pengelolaan tingkat layanan |
| 5 | Jaringan Intra Pemerintah | Sudah dilakukan inventarisasi dan pengelolaan perangkat koneksi jaringan intra pemerintah | Jaringan yang menjamin kemampuannya menjalankan aplikasi dan lalu lintas prioritas tinggi secara andal | <i>Partially</i> | Pengelolaan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Blora |
| | | Pengelolaan perangkat jaringan komunikasi terbatas Kabupaten Blora | Pengelolaan jaringan berbasis perangkat lunak pemisah control plane dan data plane pada perangkat jaringan komputer | <i>None</i> | Penyusunan arsitektur dan pengelolaan jaringan intra Kabupaten Blora dengan SDWAN |
| | | Terdapat penggunaan perangkat pribadi untuk melakukan aktivitas perkantoran | Pengendalian penggunaan perangkat pribadi untuk aktivitas kantor | <i>Partially</i> | Inventarisasi dan pengendalian perangkat secara fisik dan logis |
| 6 | Sistem Penghubung Layanan | Sudah mulai dipersiapkan mekanisme integrasi beberapa aplikasi | Integrasi sistem berbasis layanan terstandar pada lingkungan Kabupaten Blora | <i>Partially</i> | Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Blora dan integrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Nasional |
| 7 | Komputasi Awan | Sudah dilakukan pemanfaatan fasilitas komunikasi dan kolaborasi namun masih terbatas dan dilakukan secara parsial | Pemanfaatan sistem kolaborasi dan kolaborasi <i>real time</i> secara menyeluruh di lingkungan Kabupaten Blora | <i>None</i> | Penyusunan arsitektur, uji coba, pengelolaan dan peningkatan sistem komunikasi dan kolaborasi |

Arsitektur Keamanan

| NO. | KOMPONEN | KONDISI SAAT INI | KONDISI TARGET | PERUBAHAN | REKOMENDASI TINDAK LANJUT |
|-----|---|--|---|------------------|---|
| 1 | Penyusunan Meta Data Arsitektur Keamanan | Belum terdapat Meta Data Arsitektur Keamanan Kabupaten Blera | Memiliki Meta Data Arsitektur Keamanan | None | Menyusun Meta Data Arsitektur Keamanan Kabupaten Blera |
| 2 | Kesadaran Keamanan | Sudah dilakukan sosialisasi tentang keamanan secara parsial. Tim Diskominfo sudah mendapatkan pelatihan untuk melakukan <i>Pentest</i> dan <i>Cyber Security</i> | SDM yang memiliki kesadaran keamanan yang baik. | <i>Partially</i> | Pelatihan ISO 27001 dan pelatihan berkala tentang kasus ancaman, Blera dan teknologi keamanan terbaru |
| 3 | Kerentanan Keamanan | Sudah dilakukan pengujian kerentanan keamanan untuk beberapa aset aplikasi dan infrastruktur | Identifikasi risiko dan vulnerability untuk aset keamanan informasi | <i>Partially</i> | Implementasi dan optimalisasi ITSA (IT Security Assessment) dan forensik IT |
| 4 | Maturity Level Keamanan Informasi | Belum dilakukan penyusunan dokumen keamanan informasi berbasis SNI ISO 27001 untuk mendukung kesiapan <i>assessment Maturity Level</i> Keamanan Informasi | Terukurnya tingkat Keamanan Informasi | None | <i>Assessment Maturity Level</i> Keamanan Informasi |
| 5 | Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi | Belum dilakukan penyusunan dokumen keamanan informasi dengan mengacu pada kontrol dari standar SNI ISO 27001 untuk Pusat Data | Tersertifikasinya Pusat Data dan TIK Diskominfo secara umum | None | Penyusunan Dokumen dan Audit Surveillance Keamanan Informasi dan sertifikasi SNI ISO 27001 |

| No. | Kondisi Saat Ini | Kondisi Saat Ini | Kondisi yang Diharapkan | Pembinaan | Penguatan dan Peningkatan Layanan |
|-----|-------------------------------------|--|--|------------------|--|
| 6 | Peningkatan dan Penanganan Keamanan | Sudah dibentuk tim Kabupaten Blora untuk penanganan insiden dan mitigasi | Kecepatan dan ketepatan penanganan insiden untuk memenuhi aspek keamanan informasi | <i>Partially</i> | Penguatan layanan proaktif dan reaktif Keamanan Sistem Informasi |

Tata Kelola dan Manajemen SPBE

| No. | Kondisi Saat Ini | Kondisi Saat Ini | Kondisi yang Diharapkan | Pembinaan | Penguatan dan Peningkatan Layanan |
|-----|---|---|--|------------------|--|
| 1 | Struktur Tata Kelola SPBE/ Fungsi Strategis | Sudah terbentuk tim koordinasi SPBE yang terdiri dari tim pengarah dan pelaksana SPBE. Tim pengarah selain berperan sebagai pengarah SPBE juga sebagai komite TIK/ IT Steering Committee Kabupaten Blora. Idealnya tim pengarah beranggotakan baik dari internal Kabupaten Blora maupun dari eksternal berupa stakeholder terkait atau yang dapat memberikan masukan strategis kepada Kabupaten Blora khususnya dalam konteks SPBE. Penanggung jawab fungsi TIK ada dibawah Diskominfo yang dikepalai Kepala. | Fungsi utama Tata Kelola SPBE/ fungsi strategis TIK sudah terpenuhi. Kedepan fungsi pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Kepala Diskominfo selaku pemegang peran CIO (<i>Chief Information Officer</i>), juga berperan sebagai CISO (<i>Chief Information Security Officer</i>) | <i>Partially</i> | Fungsi utama tata kelola SPBE/ fungsi strategis TIK sudah terpenuhi. Ke depan fungsi pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Penambahan peran Kepala Diskominfo selaku pemegang peran CIO (<i>Chief Information Officer</i>), sebaiknya juga berperan sebagai CISO (<i>Chief Information Security Officer</i>) |

| No | Kompetensi | Komponen | Membangun | Penguasaan | Peningkatan |
|----|--|--|---|-------------------------|--|
| 2 | Struktur Manajemen TIK/ Fungsi Operasional | <p>Penanggung jawab fungsi operasional TIK ada dibawah Diskominfo yang dikepalai Kepala Diskominfo.</p> <p>Dalam konteks operasional TIK dibentuk pula tim pelaksana SPBE dan Tim Kerja Bidang Pengembangan Sistem Informasi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengembangan Aplikasi (<i>Development</i>) • Tim Operasional Aplikasi (<i>Operation</i>) • Tim Administrator Database • Tim Keamanan Sistem Informasi • Tim Dokumentasi • Tim Pengelola Data Center • Tim Infrastruktur dan Jaringan TIK • Tim Komunikasi dan Kolaborasi • Tim Tata Kelola TIK • Tim IT Support <p>Belum ada fungsi yang bertanggung jawab mengelola audit TIK dan pengelolaan proyek TIK</p> | <p>Fungsi utama manajemen TIK/ fungsi perencanaan dan operasional TIK sudah terpenuhi. Kedepan pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.</p> <p>Sebaiknya ada penambahan fungsi yang mengelola manajemen proyek TIK dalam bentuk PMO (<i>Project Management Office</i>) dan audit TIK baik audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan TIK.</p> <p>Fungsi pengawasan, evaluasi dan monitoring TIK perlu lebih diaktifkan melalui peran Inspektorat</p> | <p><i>Partially</i></p> | <p>Fungsi utama manajemen TIK/ fungsi perencanaan dan operasional TIK sudah terpenuhi. Ke depan pelaksanaannya perlu selalu dilakukan evaluasi untuk dapat dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.</p> <p>Penambahan fungsi yang mengelola proyek TIK dalam bentuk PMO (<i>Project Management Office</i>).</p> <p>Fungsi pengawasan, evaluasi dan monitoring TIK lebih diaktifkan melalui peran Inspektorat</p> |
| 3 | Pengembangan SDM TIK | Kompetensi SDM TIK yang ada kurang sesuai dengan | Perkembangan tren teknologi yang cepat perlu diimbangi | <i>Partially</i> | Melakukan penguatan kompetensi SDM TIK dan Data melalui: |

| KOMPONEN | KONDISI SAAT INI | KONDISI SAKIT INI | KONDISI SEHAT | TINDAKAN | KONDISI SAAT INI |
|----------|---------------------------------------|---|---|------------------|---|
| | | kebutuhan dan perkembangan teknologi | dengan kompetensi SDM TIK Kabupaten Blora | | <p>a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Peta Okupansi TIK dan Keamanan Siber</p> <p>b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi individu, baik SKKNI maupun Internasional</p> <p>c. Peningkatan kompetensi TIK dan Keamanan Siber pada jabatan fungsional Pranata Komputer, Statistisi, Sandiman, Manggala Informatika, dan Peneliti</p> <p>d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Seminar, <i>Workshop</i>, Magang, <i>Awareness</i> Keamanan, TIK, dan Data</p> <p>e. Pelaksanaan kajian Analisis Beban Kerja SDM TIK Kabupaten Blora</p> |
| 4 | Proses Tata Kelola TIK: Kebijakan TIK | Kebijakan Pengelolaan TIK secara umum di Kabupaten Blora saat ini berupa Peraturan Bupati Blora. Kebijakan lainnya sesuai dengan arahan Perpres 95 Tahun 2018 yang belum tersedia adalah yang terkait kebijakan manajemen SPBE meliputi: manajemen layanan, manajemen risiko, manajemen pengetahuan, manajemen keamanan | Kebijakan dan SOP TIK perlu dilengkapi untuk menjadi pedoman pelaksanaan seluruh Proses TIK, baik untuk memperbaiki dan melengkapi kebijakan yang sudah ada, khususnya memenuhi arahan dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Kebijakan penyelenggaraan Teknologi | <i>Partially</i> | Melakukan update Peraturan Bupati Blora, khususnya memenuhi arahan dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan memperbaiki konten kebijakan yang masih kurang dari hasil evaluasi SPBE. |

| No. | Kategori | Kelebihan | Kelemahan | Tingkat | Saran |
|-----|------------------------------|---|--|-----------|---|
| 5 | SOP TIK | <p>informasi, manajemen data, manajemen SDM TIK, manajemen aset dan manajemen perubahan</p> <p>SOP terkait TIK sudah cukup banyak disusun dan diimplementasikan, namun masih belum lengkap khususnya untuk mengakomodasi SOP terkait Manajemen SPBE dan Audit TIK sesuai arahan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE</p> | <p>Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Blora perlu diperbaharui untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.</p> <p>SOP terkait sudah lengkap, disahkan dan diimplementasikan dalam aktivitas operasional TIK, minimal memenuhi persyaratan sesuai arahan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE</p> | Partially | <p>Melakukan update dan penambahan SOP TIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan Review Rencana Induk SPBE 2) Perencanaan Anggaran dan Biaya TIK 3) Manajemen SDM TIK 4) Manajemen Risiko 5) Manajemen Keamanan Informasi 6) Manajemen Data 7) Manajemen Pengetahuan 8) Manajemen Perubahan 9) Manajemen Layanan 10) Manajemen Aset TIK 11) Manajemen Proyek TIK 12) Audit Infrastruktur 13) Audit Aplikasi 14) Audit Keamanan |
| 6 | Pemantauan dan Evaluasi SPBE | <p>Sudah terdapat pelaksanaan evaluasi SPBE secara periodik, namun belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Manajemen SPBE serta belum melakukan Audit TIK yang meliputi audit</p> | <p>Perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen SPBE dan Audit TIK (infrastruktur, aplikasi, dan keamanan) secara lebih komprehensif di Kabupaten</p> | Partially | <p>Perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen Risiko b. Manajemen Data c. Manajemen Keamanan Informasi |

| NO. | KOSPONEN | KONDISI SAAT INI | KONDISI TARGET | KONDISI TERJALAN | REKOMENDASI TINDAK SELANJUTANYA |
|-----|---|--|---|------------------|--|
| | | infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan secara lebih komprehensif di Kabupaten Blora | Blora | | <ul style="list-style-type: none"> d. Manajemen Layanan e. Manajemen Aset TIK f. Manajemen SDM g. Manajemen Perubahan h. Manajemen Pengetahuan Perlu melakukan Audit TIK secara komprehensif; i. Audit Infrastruktur j. Audit Aplikasi k. Audit Keamanan |
| 7 | Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu TIK Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan | Kabupaten Blora belum memiliki sertifikasi untuk sistem manajemen mutu terkait TIK <i>Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan</i> termasuk manajemen risiko TIK saat ini belum disusun | Perlu melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu terkait TIK terutama terkait sistem manajemen layanan TIK dan sistem manajemen keamanan informasi Perlu review dan evaluasi berkala dari <i>Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan</i> | None | <p>Perlu melakukan konsultasi dan sertifikasi internasional TIK untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi SNI ISO 20000:2018 terkait sistem manajemen layanan TIK b. Sertifikasi SIN ISO 27001:2013 terkait sistem manajemen keamanan informasi <p>Review dan evaluasi berkala dari <i>Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan</i></p> |
| 8 | Pengguna Layanan SPBE | Belum terdapat survei atau indikator untuk mengetahui kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kabupaten Blora | Perlu melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kabupaten Blora dan melakukan peningkatan | None | Pelaksanaan Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan SPBE Kabupaten Blora |

KETERANGAN PEMENUHAN:

None achieved: 0-15%

Partially achieved: 15-50%

Largely achieved: 50-85%

Fully achieved: 85-100%

Setelah dilakukan analisis kesenjangan, kemudian perlu disusun deskripsi dari inisiatif-inisiatif SPBE yang muncul dan dipetakan ke dalam periode 5 (lima) tahunan beserta pemangku kepentingan terkait sebagaimana berikut.

Tabel 5. Deskripsi Inisiatif SPBE

| NO | NAMA INISIATIF | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT |
|-----------|---|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| A. | ARSITEKTUR PROSES BISNIS | | | | | | |
| A.1 | Penyusunan Peta Proses Bisnis Terintegrasi | | | | | | Bagian Organisasi |
| A.2 | Pengesahan Kebijakan Proses Bisnis Terintegrasi | | | | | | Bagian Organisasi, Bagian Hukum |
| A.3 | Penyusunan Meta Data Arsitektur Proses Bisnis | | | | | | Bagian Organisasi |
| B. | ARSITEKTUR DATA | | | | | | |
| B.1 | Penyusunan Detail Arsitektur Satu Data Kabupaten Blora | | | | | | Bagian Organisasi, Dinkominfo |
| B.2 | Pemeliharaan dan Pengembangan Satu Data Kabupaten Blora | | | | | | Dinkominfo |
| B.3 | Penyusunan Meta Data Arsitektur Proses Bisnis | | | | | | Bagian Organisasi, Dinkominfo |

| NO | PILAR INDIKATOR | 2022 2023 2024 2025 2026 | | | | | PEMANGKUL KEGIATAN TERKAIT |
|-----------|--|--------------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | | | |
| C. | ARSITEKTUR LAYANAN | | | | | | |
| C.1 | Layanan Administrasi Pemerintahan | | | | | | |
| a) | Implementasi Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Berbagi Pakai Nasional – Opsional Percepatan SPBE | | | | | | Dinkominfo |
| b) | Pembangunan Portal Intranet Kabupaten Blora/e-Office – <i>Web Based</i> | | | | | | Dinkominfo |
| c) | Pembangunan Portal Intranet Kabupaten Blora /e-Office – <i>Mobile</i> | | | | | | Dinkominfo |
| d) | Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan/ Portal Intranet Kabupaten Blora /e-Office | | | | | | Dinkominfo |
| C.2 | Layanan Publik | | | | | | |
| a) | Pengembangan dan integrasi layanan publik ke Portal Layanan Publik Kabupaten Blora – <i>Web Based</i> | | | | | | Dinkominfo |
| b) | Pengembangan dan integrasi layanan publik Kabupaten Blora ke satu aplikasi layanan publik <i>mobile</i> yang terintegrasi dan komprehensif – <i>Mobile (Android dan IOS)</i> | | | | | | Dinkominfo |
| c) | Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Layanan Publik Kabupaten Blora (Web dan Mobile) | | | | | | Dinkominfo |
| D. | ARSITEKTUR APLIKASI | | | | | | |
| D.1 | Pengembangan Aplikasi Umum Target | | | | | | |

| No | PILIHAN | | | | | | PUSAT |
|-------|--|--|--|--|--|---|---|
| D.1.1 | Perencanaan dan Penganggaran - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional | | | | | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat, Bappeda | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat, Bappeda |
| D.1.2 | Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional | | | | | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat, Bppkad | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat, Bppkad |
| a) | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional | | | | | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| b) | Akuntabilitas Kinerja - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional Percepatan SPBE Nasional | | | | | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat, Bappeda | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat, Bappeda |
| c) | Pantauan dan Evaluasi - Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional Percepatan SPBE Nasional | | | | | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo, Inspektorat |
| d) | Integrasi Aplikasi Naskah Dinas dengan e-office Kabupaten Blora | | | | | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo |
| e) | Integrasi dengan SIAN dan SIMPEGNAS dari BKN - Percepatan SPBE Nasional | | | | | BKD, Dinkominfo, Bagian Organisasi | BKD, Dinkominfo, Bagian Organisasi |
| f) | Pengembangan Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik SP4N LAPOR untuk integrasi dan tindak lanjut monitoring pengaduan di perangkat daerah | | | | | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo | Instansi Pusat Terkait, Dinkominfo |
| g) | Implementasi Aplikasi WBS Berbagi Pakai Nasional dari KPK | | | | | Inspektorat | Inspektorat |
| h) | Integrasi JDIIH Kabupaten Blora dan JDIIH Kemenkumham | | | | | Bagian Hukum | Bagian Hukum |
| i) | Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Blora | | | | | Dinkominfo | Dinkominfo |
| j) | Pemeliharaan Aplikasi Umum Kabupaten Blora | | | | | Dinkominfo | Dinkominfo |

| No | Nama Kegiatan | | | | | | | Pembina Kegiatan |
|-----|---|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| D.2 | Pengembangan Aplikasi Khusus - Target | | | | | | | |
| a) | Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus per Fungsional di Kabupaten Blora | | | | | | Dinkominfo | |
| b) | Pengembangan Aplikasi Fungsi Pengawasan (Inspektorat) dan Integrasi aplikasi terkait | | | | | | Inspektorat | |
| c) | Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus Pelayanan Publik Pada Portal Web Layanan Publik Kabupaten Blora | | | | | | Dinkominfo | |
| d) | Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus Pelayanan Publik Pada Aplikasi Mobile Layanan Publik Kabupaten Blora Terintegrasi (Android dan iOS) | | | | | | Dinkominfo | |
| e) | Pemeliharaan Aplikasi Khusus Kabupaten Blora | | | | | | Dinkominfo | |
| D.3 | Integrasi Aplikasi | | | | | | | |
| a) | Implementasi Sistem penghubung atau Government Service Bus (GSB) dan API Gateway Kabupaten Blora | | | | | | Dinkominfo | |
| b) | Implementasi Integrasi Aplikasi di lingkup Kabupaten Blora Berbasis <i>Microservices</i> , <i>API</i> , Sistem Penghubung | | | | | | Dinkominfo | |
| c) | Implementasi Authorization dan Authentication System secara terintegrasi | | | | | | Dinkominfo | |
| d) | Integrasi Layanan Internal Kabupaten Blora dengan Layanan Eksternal Instansi Lain | | | | | | Dinkominfo | |
| D.4 | Pengembangan <i>Data Warehouse</i> , <i>Business Intelligence</i> , dan <i>Big Data Analytic</i> | | | | | | | |

| No | Nama Kegiatan | Dana | Lokasi | Waktu | Kategori | Dinkominfo |
|-----------|--|------|--------|-------|----------|------------|
| a) | Perancangan <i>Data Warehouse</i> dan <i>Analytic</i> | | | | | Dinkominfo |
| b) | Implementasi <i>ETL (Extract, Transform, Load)</i> Aplikasi | | | | | Dinkominfo |
| c) | Pengembangan Sistem <i>Business Intelligence</i> | | | | | Dinkominfo |
| d) | Pengembangan <i>Big Data Analytic</i> | | | | | Dinkominfo |
| e) | Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif/ <i>Dashboard</i> Terintegrasi Kabupaten Blora | | | | | Dinkominfo |
| f) | Penyediaan lisensi software aplikasi | | | | | Dinkominfo |
| E. | ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR | | | | | |
| E.1 | Penyusunan Meta Data Infrastruktur | | | | | Dinkominfo |
| E.2 | Optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional sebagai fungsi <i>co-location</i> dan <i>data storage</i> | | | | | Dinkominfo |
| E.3 | Pengelolaan dan pelengkapan fasilitas, serta penyusunan dokumen pengelolaan Pusat Data agar mendukung strata 3 SNI 8799 series dalam rangka sertifikasi SNI Pusat Data | | | | | Dinkominfo |
| E.4 | Server dan Storage: Inventarisasi dan pengelolaan ulang Virtual Machine (VM) sesuai arsitektur aplikasi | | | | | Dinkominfo |
| E.5 | Server dan Storage: Inventarisasi dan strategi pengelolaan backup sistem dan aplikasi | | | | | Dinkominfo |
| E.6 | Server dan Storage: Peningkatan kapasitas storage Pusat Data Kabupaten Blora | | | | | Dinkominfo |
| E.7 | Manajemen Infrastruktur: optimalisasi sistem | | | | | Dinkominfo |

| NO | KATA PENGANTAR | DAFTAR ISI | DAFTAR GAMBAR | DAFTAR TABEL | DAFTAR LAMPIRAN |
|-----------|--|------------|---------------|--------------|-----------------|
| | monitoring (NOC) untuk jaringan dan layanan aplikasi | | | | |
| E.8 | Pengelolaan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Blora | | | | Dinkominfo |
| E.9 | Penyusunan arsitektur, uji coba, pengelolaan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Blora dan IPPD lain dengan SDWAN | | | | Dinkominfo |
| E.10 | Pembangunan Sistem Penghubung Layanan dan integrasi dengan SPL Nasional | | | | Dinkominfo |
| E.11 | Inventarisasi dan pengendalian End Point/End User Infrastructure | | | | Dinkominfo |
| E.12 | Penyusunan arsitektur, uji coba, pengelolaan dan peningkatan sistem komunikasi dan kolaborasi | | | | Dinkominfo |
| F. | ARSITEKTUR KEAMANAN | | | | |
| F.1 | Penyusunan Meta Data Keamanan | | | | Dinkominfo |
| F.2 | Edukasi kesadaran keamanan SPBE | | | | Dinkominfo |
| F.3 | Implementasi dan optimalisasi ITSA (<i>IT Security Assessment</i>) dan <i>IT Forensic</i> | | | | Dinkominfo |
| F.4 | Asesmen Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | | | | Dinkominfo |
| F.5 | Penyusunan Dokumen dan Audit Survailen Keamanan Informasi dan Sertifikasi ISO 27001 | | | | Dinkominfo |
| F.6 | Pembentukan CISRT Kabupaten Blora dan penguatan layanan proaktif dan reaktif Keamanan Sistem Infomasi | | | | Dinkominfo |

| Kategori | | Kategori | | Kategori | | Kategori | | Kategori | |
|------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---|
| G. | TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE | | | | | | | | |
| G.1 | Kebijakan Internal SPBE | | | | | | | | |
| G.1.1 | Penyusunan dan Penetapan Permendagri tentang SPBE | | | | | | | | Dinkominfo, Bagian Hukum |
| G.1.2 | Review dan evaluasi Permendagri tentang SPBE | | | | | | | | Dinkominfo, Bagian Hukum |
| G.2 | Tata Kelola SPBE | | | | | | | | |
| G.2.1 | Pembentukan dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE | | | | | | | | Tim Koordinasi SPBE |
| G.2.2 | Penyusunan dan Review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE | | | | | | | | Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi |
| G.2.3 | Perencanaan Anggaran dan Biaya SPBE | | | | | | | | Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi, Inspektorat |
| G.2.4 | Forum Kolaborasi SPBE Kabupaten Blora | | | | | | | | Dinkominfo |
| G.2.5 | Penguatan Kompetensi SDM TIK | | | | | | | | Dinkominfo |
| G.3 | Manajemen SPBE | | | | | | | | |
| G.3.1 | Penyusunan dan review pedoman Manajemen Risiko | | | | | | | | Inspektorat |
| G.3.2 | Penyusunan dan review pedoman Manajemen Data | | | | | | | | Dinkominfo |
| G.3.3 | Penyusunan dan review pedoman Manajemen Layanan | | | | | | | | Bagian Organisasi |
| G.3.4 | Penyusunan dan review pedoman Manajemen Keamanan Informasi | | | | | | | | Dinkominfo |
| G.3.5 | Penyusunan dan review pedoman Manajemen Perubahan | | | | | | | | Bagian Organisasi |

| No | Pencapaian | Pembinaan dan Peningkatan |
|------------|--|-------------------------------|
| G.3.6 | Penyusunan dan review pedoman Manajemen Pengetahuan | Dinkominfo |
| G.3.7 | Penyusunan dan review pedoman Manajemen SDM | Bagian Organisasi |
| G.3.8 | Penyusunan dan review pedoman Manajemen Aset TIK | Dinkominfo |
| G.4 | Audit TIK | |
| G.4.1 | Penyusunan dan review pedoman Audit TIK (Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan) | Tim Evaluator Internal SPBE |
| G.4.2 | Pelaksanaan Audit Internal TIK | Dinkominfo |
| G.4.3 | Pelaksanaan Audit Eksternal TIK | LATIK (Lembaga Audit TIK) |
| G.5 | Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu TIK | |
| G.5.1 | Sertifikasi SNI ISO 20000:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan TIK | Dinkominfo |
| G.5.2 | Sertifikasi SNI ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi | Dinkominfo |
| G.6 | Pemantauan dan Evaluasi SPBE | Tim Evaluator Internal SPBE |
| G.7 | Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Layanan SPBE | Dinkominfo, Bagian Organisasi |

Selain itu, juga perlu dipetakan strategi sumber daya dari inisiatif-inisiatif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti contoh pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Strategi Sumber Daya Inisiatif SPBE

| No | DAFTAR INISIATIF SPBE | Tipe Kegiatan Baru / Upgrade / Maintenance | Tipe Anggaran Bentuk Biaya Sumber Dana (Opex) | Tipe Pengadaan (Pengembangan / Konsultasi / Konsultansi / Konsultansi) | Tipe Sourcing Inisiatif Sourcing Co-Sourcing | Tipe Sourcing Sourcing Co-Sourcing |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| A. ARSITEKTUR PROSES BISNIS | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Peta Proses Bisnis Terintegrasi | Upgrade | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Insourcing |
| 2. | Pengesahan Kebijakan Proses Bisnis Terintegrasi | Upgrade | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 3. | Penyusunan Arsitektur Meta Data Arsitektur Proses Bisnis | Baru | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Insourcing |
| B. ARSITEKTUR DATA | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Detail Arsitektur Satu Data Kabupaten Blora | Baru | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Insourcing |
| 2. | Pemeliharaan dan Pengembangan Satu Data Kabupaten Blora | Maintenance | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 3. | Penyusunan Arsitektur Meta Data Arsitektur Data | Baru | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Insourcing |

| NO | BENTUK WISATA/ RUMAH | Tipe Fasilitas/ Ruang | Tipe Kegiatan/ Ruang/ Fungsi | Tipe Perencanaan/ Ruang/ Fasilitas/ Lingkungan/ Kawasan | Tipe Pendanaan/ Ruang/ Fasilitas/ Lingkungan/ Kawasan | Tipe Operasional/ Ruang/ Fasilitas/ Lingkungan/ Kawasan |
|-----------|--|-----------------------|------------------------------|---|---|---|
| C. | ARSITEKTUR LAYANAN | | | | | |
| 1. | Implementasi Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Nasional-Optional Percepatan SPBE | Baru | Opex | Akuisisi | Co-Sourcing | Insourcing |
| 2. | Pembangunan Portal Intranet Kabupaten Blora / e-Office-Web Based | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-Sourcing | Insourcing |
| 3. | Pembangunan Portal Intranet Kabupaten Blora / e-Office-Mobile | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-Sourcing | Insourcing |
| 4. | Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Administrasi Pemerintahan/ Portal Intranet Kabupaten Blora/e-Office | Maintenance | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 5. | Pengembangan dan integrasi layanan publik ke Portal Layanan Publik Kabupaten Blora-Web Based | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-Sourcing | Insourcing |
| 6. | Pengembangan dan integrasi layanan publik Kabupaten Blora ke satu aplikasi layanan publik <i>mobile</i> yang terintegrasi dan komprehensif-Mobile (<i>Android dan iOS</i>) | Baru | Opex | Pengembangan | Co-Sourcing | Insourcing |
| 7. | Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Layanan Publik Kabupaten Blora (<i>Web dan Mobile</i>) | Maintenance | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |

| NO | PARTNER/INSTRUMENT SPBE | Tipe Kegiatan Barang/Jasa /Operasional | Tipe Anggaran Barang/Jasa /Operasional | Tipe Perencanaan Penganggaran/ Perencanaan Keuangan | Tipe Pelaksanaan Pembangunan/ Co-Sourcing | Tipe Operasional Pembangunan/ Co-Sourcing |
|-------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| D. ARSITEKTUR APLIKASI | | | | | | |
| 1. | Perencanaan dan Penganggaran-Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional | Upgrade | Opex | Akuisisi | Co-sourcing | Co-sourcing |
| 2. | Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara-Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional | Upgrade | Opex | Akuisisi | Co-sourcing | Co-sourcing |
| 3. | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah- Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional | Upgrade | Opex | Akuisisi | Co-sourcing | Co-sourcing |
| 4. | Akuntabilitas Kinerja-Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional Percepatan SPBE Nasional | Upgrade | Opex | Akuisisi | Co-sourcing | Co-sourcing |
| 5. | Pemantauan dan Evaluasi-Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional Percepatan SPBE Nasional | Upgrade | Opex | Akuisisi | Co-sourcing | Co-sourcing |
| 6. | Integrasi Aplikasi Naskah Dinas dengan e-office Kabupaten Blora | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-sourcing | Co-sourcing |
| 7. | Integrasi dengan SIASN dan SIMPEGNAS dari BKN-Aplikasi Umum Berbagi Pakai Percepatan SPBE Nasional Percepatan SPBE Nasional | Upgrade | Opex | Pengembangan/ Akuisisi | Co-sourcing | Co-sourcing |

| No | Nama Kegiatan | Kategori Kegiatan | Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan | Tipe Kegiatan | Model Pelaksanaan Kegiatan | Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan |
|-----|--|-------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 8. | Pengembangan Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik SP4N LAPOR untuk integrasi dan tindak lanjut monitoring pengaduan di perangkat daerah | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-sourcing | Co-sourcing |
| 9. | Implementasi Aplikasi WBS Berbagai Pakai Nasional dari KPK | Baru | Opex | Akuisisi | Co-sourcing | Insourcing |
| 10. | Integrasi JDIH Kabupaten Blora dan JDIH Kemenkumham | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-sourcing | Insourcing |
| 11. | Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Blora | Baru | Opex | Pengembangan | Co-sourcing | Insourcing |
| 12. | Pemeliharaan Aplikasi Umum Kabupaten Blora | Maintenance | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 13. | Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus per Fungsional di Kabupaten Blora | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-sourcing | Insourcing |
| 14. | Pengembangan Aplikasi Fungsi Pengawasan (Inspektorat) dan Integrasi aplikasi terkait | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-sourcing | Insourcing |
| 15. | Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus Pelayanan Publik Pada Portal Web Layanan Publik Kabupaten Blora | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-sourcing | Insourcing |

| No | DAFTAR INISIASI GIGI | Tipe Kegiatan Baru/Upgrade | Tipe Anggaran Baru/Upgrade | Tipe Kegiatan Pengembangan | Tipe Penyediaan Baru/Upgrade | Tipe Pembayaran Baru/Upgrade |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 16. | Konsolidasi dan Integrasi Aplikasi Khusus Pelayanan Publik Pada Aplikasi Mobile Layanan Publik Kabupaten Blora Terintegrasi (Android dan iOS) | Upgrade | Opex | Pengembangan | Co-sourcing | Insourcing |
| 17. | Pemeliharaan Aplikasi Khusus Kabupaten Blora | Baru | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 18. | Pengembangan Implementasi Manage Engine Service Plus dengan melengkapi CMDB (<i>Configuration Management Database</i>) untuk seluruh lingkup Kabupaten Blora, dan menjalankan proses lainnya secara lengkap sesuai siklus manajemen layanan TIK | Upgrade | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 19. | Implementasi Sistem Penghubung atau <i>Government Service Bus (GSB)</i> dan <i>API Gateway</i> Kabupaten Blora | Baru | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 20. | Implementasi Integrasi Aplikasi di lingkup Kabupaten Blora Berbasis <i>Microservices, API</i> , Sistem Penghubung | Upgrade | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 21. | Implementasi <i>Authorization dan Authentication System</i> secara terintegrasi | Baru | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing |
| 22. | Integrasi Layanan Internal Kabupaten Blora dengan Layanan Eksternal Instansi Lain | Upgrade | Opex | Pengembangan | Insourcing | Co-sourcing |

| NO | DAFTAR INDIKATOR GUNA | SPEKTRUM TIPE (Baru/ Upgrade/ Maintenance) | TIPE AKSES/ALOKASI (Capex/ Opex) | TIPE PEGAWAI (Konsultansi/ Pengembangan/ Lainnya) | TIPE PEMBIAYAAN (Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing) | TIPE OPERASI (Insourcing/ Outsourcing/ Co-Sourcing) |
|------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|---|
| 23. | Perancangan Data Warehouse dan Analytic | Upgrade | Capex | Konsultansi | Co-Sourcing | Insourcing |
| 24. | Implementasi ETL (Extract, Transform, Load) Aplikasi | Upgrade | Capex | Konsultansi dan Pengembangan | Co-Sourcing | Insourcing |
| 25. | Pengembangan Sistem Business Intelligence | Upgrade | Capex | Konsultansi dan Pengembangan | Co-Sourcing | Insourcing |
| 26. | Pengembangan Big Data Analytic | Upgrade | Capex | Konsultansi dan Pengembangan | Co-Sourcing | Insourcing |
| 27. | Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif/ Dashboard Terintegrasi Kabupaten Blora | Upgrade | Capex | Konsultansi dan Pengembangan | Co-Sourcing | Insourcing |
| 28. | Penyediaan lisensi software aplikasi | Baru | Capex | Akuisisi | Outsourcing | Outsourcing |
| E. ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Meta Data Infrastruktur | Baru | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Insourcing |
| 2. | Optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional sebagai fungsi co-location dan data storage | Maintenance | Opex | Akuisisi | Co-Sourcing | Co-Sourcing |
| 3. | Pengelolaan dan pelengkapan fasilitas, serta penyusunan dokumen pengelolaan Pusat Data agar mendukung strata 3 SNI8799 series dalam rangka sertifikasi SNI Pusat Data | Maintenance | Opex | Konsultansi | Outsourcing | Co-Sourcing |

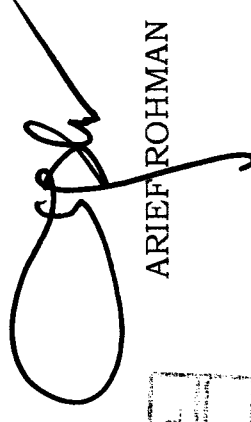
| NO | DAFTAR INDIKATOR | THE BUSINESS VALUE | THE BUSINESS MODEL | THE BUSINESS STRATEGY | THE BUSINESS MODEL | THE BUSINESS MODEL |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4. | Server dan Storage: Inventarisasi dan pengelolaan ulang <i>Virtual Machine</i> (VM) sesuai arsitektur aplikasi | <i>Maintenance</i> | <i>Opex</i> | Konsultansi | <i>Insourcing</i> | <i>Insourcing</i> |
| 5. | Server dan Storage: Inventarisasi dan strategi pengelolaan backup sistem dan aplikasi | <i>Maintenance</i> | <i>Opex</i> | Konsultansi | <i>Insourcing</i> | <i>Insourcing</i> |
| 6. | Server dan Storage: Peningkatan kapasitas storage Pusat Data Kabupaten Blora | Baru | <i>Capex</i> | Akuisisi | <i>Outsourcing</i> | <i>Co-Sourcing</i> |
| 7. | Manajemen Infrastruktur: optimalisasi sistem monitoring (NOC) untuk jaringan dan layanan aplikasi | <i>Upgrade</i> | <i>Capex</i> | Konsultansi dan Pengembangan | <i>Outsourcing</i> | <i>Co-Sourcing</i> |
| 8. | Pengelolaan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Blora Kantor Pusat | <i>Upgrade</i> | <i>Opex</i> | Pengembangan | <i>Insourcing</i> | <i>Insourcing</i> |
| 9. | Penyusunan arsitektur, uji coba, pengelolaan dan peningkatan koneksi jaringan intra Kabupaten Blora Kantor Pusat dan UPT atau IPPD dengan SDWAN | Baru | <i>Capex</i> | Konsultansi dan Pengembangan | <i>Co-Sourcing</i> | <i>Co-Sourcing</i> |
| 10. | Pembangunan Sistem Penghubung Layanan dan integrasi dengan SPL Nasional | Baru | <i>Capex</i> | Konsultansi dan Pengembangan | <i>Co-Sourcing</i> | <i>Co-Sourcing</i> |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|------|------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| 11. | Inventarisasi dan pengendalian End Point/End User Infrastructure | Maintenance | Opex | Implementasi | Insourcing | Insourcing | | |
| F. | ARSITEKTUR KEAMANAN | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan Meta Data Arsitektur Keamanan | Baru | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Insourcing | | |
| 2. | Edukasi kesadaran keamanan SPBE | Maintenance | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | | |
| 3. | Implementasi dan optimalisasi ITSA (IT Security Assessment) dan IT Forensic | Maintenance | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | | |
| 4. | Asesmen Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | Maintenance | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | | |
| 5. | Penyusunan Dokumen dan Audit Survailen Keamanan Informasi dan Sertifikasi ISO 27001 | Maintenance | Opex | Konsultansi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | | |
| 6. | Pembentukan CISRT Kabupaten Blora dan penguatan layanan proaktif dan reaktif Keamanan Sistem Infomasi | Upgrade | Opex | Konsultansi dan Pengembangan | Co-Sourcing | Co-Sourcing | | |
| G. | TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE | | | | | | | |
| 1. | Penyesuaian dan Penambahan Peran Pada Struktur Organisasi SPBE | Upgrade | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 2. | Menyusun kebijakan internal tata kelola SPBE, sebagai update Kebijakan TIK Kabupaten Bora, sesuai arahan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 SPBE | Upgrade | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing | Insourcing | Insourcing | Insourcing |
| 3. | Update dan Penambahan SOP TIK Kabupaten Bora, sesuai kebutuhan operasional dan arahan kebijakan | Upgrade | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing | Insourcing | Insourcing | Insourcing |
| 4. | Penguatan Kompetensi SDM TIK | Upgrade | Opex | Pengembangan | Insourcing | Insourcing | Insourcing | Insourcing | Insourcing |
| 5. | Kajian Analisis Beban Kerja SDM | Maintenance | Opex | Pengembangan dan Konsultasi | Co-sourcing | Co-sourcing | Co-sourcing | Co-sourcing | Co-sourcing |
| 6. | Evaluasi SPBE secara periodik | Maintenance | Opex | Implementasi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing |
| 7. | Review Rencana Induk SPBE secara periodik | Maintenance | Opex | Implementasi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing |
| 8. | Pelaksanaan Audit TIK | Maintenance | Opex | Implementasi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing |
| 9. | Persiapan dan Implementasi Sertifikasi SNI ISO 20000:2018 | Baru | Opex | Pengembangan dan Konsultasi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing |
| 10. | Persiapan dan Implementasi Sertifikasi SNI ISO 27001:2013 | Baru | Opex | Pengembangan dan Konsultasi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing |
| 11. | Evaluasi dan Review Kajian Business Continuity Plan/ Disaster Recovery Plan | Maintenance | Opex | Pengembangan dan Konsultasi | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing | Co-Sourcing |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|------|--------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| 12. | Penerapan Manajemen SPBE, sesuai arahan PermenPANRB No 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE meliputi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Blora | Baru/ Maintenance | Opex | Implementasi | Insourcing | Insourcing | | |
| 13. | Pelaksanaan Survei Kebutuhan dan kepuasan Pengguna Layanan SPBE | Maintenance | Opex | Implementasi | Insourcing | Insourcing | | |

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

